

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Apeldoorn, Van, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan kedua puluh empat, Pradnya Paramita Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta
- Azis, Asmaeny dan Izlindawati, 2018, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Efendi, Aan dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Farida Indrati Soeprapto, Maria, 1998, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, kanisius, Yogyakarta.
- Gautama, Sidharta, 2006. *Kepastian Hukum di Indonesia*, Penerbit Cahaya, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung, pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali perkara perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harman, Benny K., 2013, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UUD*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

Ibrahim, Jhonny, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Normatif*, Banyumedia Publishing, Yogyakarta.

Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Rajawali Press, Jakarta.

Kusumohamidjojo, Budiono, 2016, *Teori Hukum : Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung.

Lamandasa, Raimond, 2010, *Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Yogyakarta.

Lumbun, Ronal S., 2011, *PERMA RI : wujud kerancuan antara praktik pembagian dan pemisahaan kekuasaan*, Rajawali Press, Jakarta.

Hs., Ali Marwan, 2017, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaannya di Berbagai Negara*, Setara Press, Malang.

Martitah, 2013, *Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Pres, Jakarta,

Marzuki, Laica, 2006, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Maxeiner, James, 2007, *Legal certainty and legal methods : A Eropean Alternative to American Legal Indeterminacy?*, University of Baltimore Law, United States.

MD, Mahfud, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2004, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2005, *Mengenal Hukum : suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 1997, *Metedologi Penelitian*, Bumi Pustaka, Jakarta.

Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan (1999-2002),

Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Palguna, I Dewa Gede, 2018, *Mahkamah Konstitusi : Dasar Pemikiran, Kewenangan dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Konstitusi Press, Jakarta.

Panjaitan, Marojahan J.S, 2017, *Pembentukan dan Perubahan Undang-Undang Berdasarkan Teori, Praktek, dan UUD NRI Tahun 1945*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Panggabean, Henry P., 2001, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Sirajuddin dan Winardi, 2015, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang.

Soebechi, Imam, 2016, *Hak Uji Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2012, *Judicial Review Perda Pajak Dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soehino, 2011, *Hukum Tata Negara : Teknik Perundang-undangan*, BPFE, Yogyakarta

Soemantri, Sri, 1986, *Hak Uji Materiil di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soemitro, Rochmat, 1986, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Eresco, Bandung.

Sulaiman, King Faisal, 2017, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2017, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Thafa Media, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2014, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta : 2012.

Suseno, Frans Magnis, 1993, *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta.

Yuswalina dan Kun Budianto, 2016, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Setara Press, Malang.

Zein, Yahya Ahmad, *et, all*, 2016, *Legislative Drafting : Perancangan Perundang-Undangan*, Thafa Media, Yogyakarta.

Zoelva, Hamdan, 2016, *Mengawal Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta.

### ARTIKEL JURNAL

Kordela, Marzena, “*The Principle Of Legal Certainty As a Fundamental Element Of The Formal Concept Of The Rule Of Law. Jurnal Revue du notariat*”, Volume 110 Nomor 1 September 2008.

Prayogo, R. Tony, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 N0. 02 - Juni 2016.

Simanjuntak, Enrico, “Kewenangan Hak Uji Materiil pada Mahkamah Agung RI”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 3, Juni 2013.

Simatupang, Taufik H., “Mendudukan Konsep Executive Review dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19 No. 2, Juni 2019.

Sulardi & Yohana Puspitasari Wardoyo, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 No. 3 Desember 2015.

Susetio, Wasis, “Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria”, *Jurnal Lex jurnalica* Volume 10 Nomor 3, Desember 2013.

### HASIL PENELITIAN

Aziz, Muslim, 2014, *Harmonisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dengan Praktik Perdagangan*

*Internasional di Bidang Jasa Pariwisata di Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kurniawan, 2018, *Perumusan Norma Baru dalam Undang-Undang Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Mahkamah Agung, 2014, *Mengkaji Model Dan Rumusan Hukum Acara (Ius Constituendum) Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang*, Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Bogor.

Maria Farida, 2008, *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-undangan*, Hasil Penelitian, Departemen Hukum dan HAM BPHN, Jakarta.

Noptra, 2018, *Kepastian Hukum Terhadap Tanggung Jawab Penyedia Tempat Perdagangan Online Dalam Pelanggaran Hak Cipta*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

P., Astrid Yudi., 2016, *Urgensi Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Universitas Andalas, 2010, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi (dari berpikir hukum tekstual ke hukum progresif)*, Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Andalas, Padang.

Walulima, Putra Rahmatan Septian, 2016, *Harmonisasi Perundang-Undangan Terkait Kepailitan Badan Usaha Milik Negara Persero (Analisis Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Pasal 2 (g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yudarana Sukarno Putra, 2017, *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.

## INTERNET

Artikel “Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan”,  
<https://kendari.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Sinkronisasi-Harmonisasi.pdf>, diakses pada 7 Oktober 2019.

Artikel “Penafsiran undang-undang dari prespektif penyelenggara pemerintahan”,  
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/231-penafsiran-undang-undang-dari-perspektif-penyelenggara-pemerintahan.html>, diakses pada bulan November 2019.

Kusnu Goesniadhie S, “Disharmoni Normatif Hukum Keuangan Negara Dalam Peraturan Perundang-Undangan”,  
<https://kgsc.wordpress.com/2012/01/27/disharmoni-normatif-hukum-keuangan-negara-dalam-peraturan-perundang-undangan/>, diakses pada Oktober 2019.

Nur Sholikin, “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)”,  
[www.rechtsvinding.bphn.go.id/view/view\\_online.php?id=229](http://www.rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=229), diakses pada 07 Oktober 2019.

Ricky Raya Waruwu, “Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam PERMA”,  
<https://JDIH.mahkamahagung.go.id>, diakses pada Juli 2019.

Saldi Isra, “Simalakama Putusan MA”  
<https://nasional.kompas.com/read/2009/07/31/03172511/simalakama.putusan.ma?page=all>, diakses pada 10 Januari 2020.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

## **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 10P/HUM/2012.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 25P/HUM/2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 54P/HUM/2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 05P/HUM/2018.